

Konflik Lahan dan Negosiasi Identitas: Strategi Mediasi Masyarakat Lokal dalam Lingkar Industri Pertambangan

Hariashari Rahim¹, Sawedi Muhammad², Suryanto³, Andi Nurlela⁴

¹*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Peneliti TRG Conflict and Natural, Resources Management (CONCERN), Pengurus Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Email: ashari.arrassih@unhas.ac.id*

²*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Ketua TRG Conflict and Natural, Resources Management (CONCERN), Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Chapter Sulawesi Selatan, Anggota International Sociology Association (ISA), Email: msawedi@unhas.ac.id*

³*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Student Program Studi Doktor, Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya, Peneliti TRG Conflict and Natural Resources Management (CONCERN), Pengurus Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Anggota International Sociology Association (ISA), Email: suryanto@unhas.ac.id*

⁴*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Student in National University of Malaysia, Peneliti TRG Conflict and Natural Resources Management (CONCERN), Email: andinurlela@unhas.ac.id*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika konflik lahan di lingkaran industri pertambangan nikel wilayah Malili melalui perspektif teoritik habitus dan modal dari Pierre Bourdieu. Isu yang dikaji berfokus pada benturan antara ruang hidup (*living space*) masyarakat agraris-nelayan dengan ruang produksi industri berskala besar yang dipicu oleh penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN). Temuan menunjukkan bahwa identitas komunitas di lokasi penelitian dibentuk oleh sejarah panjang eksodus, perpindahan, serta asimilasi etnis yang menciptakan identitas adaptif namun waspada terhadap ekspansi industri. Kearifan lokal masyarakat kini bertransformasi dari ritual simbolis menjadi praktik perlindungan ekologis fungsional sebagai strategi bertahan di tengah degradasi lingkungan pesisir dan daratan. Masyarakat secara aktif menegosiasikan eksistensi mereka melalui rekonfigurasi peran fungsional dan pemanfaatan lembaga formal desa sebagai ruang mediasi strategis untuk menuntut keadilan kompensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas resolusi konflik sangat bergantung pada pengakuan terhadap modal simbolis masyarakat dan penerapan model mediasi inklusif yang mampu menyeimbangkan ketimpangan kuasa antara korporasi dengan warga lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci di Desa Harapan dan Desa Pasipasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif.

Kata Kunci: Kekerasan Simbolis; Negosiasi identitas; Mediasi inklusif; Konflik lahan; Industri nikel

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Luwu Timur, khususnya wilayah Malili, saat ini bertransformasi menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan penetapan PT. Indonesia Hual Industrial Park (IHIP) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai kawasan industri berbasis nikel, kehadiran IHIP merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Namun, di balik ambisi makro tersebut, implementasi proyek skala besar ini secara inheren membawa perubahan mendasar bagi struktur sosial dan tata ruang di desa-desa terdampak seperti Desa Pongkeru, Desa Harapan, dan sekitarnya.

Konflik lahan dalam industri pertambangan umumnya muncul karena perebutan akses dan kontrol atas wilayah produksi, serta ketegangan identitas yang terbentuk dari interaksi antara perusahaan, masyarakat lokal, dan negara. Penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan tidak hanya terkait dengan sengketa fisik atas tanah, tetapi juga menyangkut proses pembentukan identitas sosial, subjektivitas aktor, dan struktur kuasa yang mengatur hubungan antar pihak (Libassi, 2024). Pada konteks kawasan industri seperti IHIP di Malili, dinamika ini muncul ketika lahan yang sebelumnya merupakan ruang hidup masyarakat harus disesuaikan menjadi ruang produksi industri nasional.

Konflik lahan muncul sebagai konsekuensi logis dari ekspansi industri yang bersinggungan dengan wilayah kelola masyarakat. Di Malili, isu ini menjadi kompleks karena lahan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang identitas yang menyimpan sejarah pemukiman dan asal-usul suku/etnis setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Peluso & Watts, (2001) dalam *Violent Environments*, konflik sumber daya alam sering kali dipicu oleh klaim kekuasaan yang tumpang tindih antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, di mana lingkungan menjadi arena kontestasi kepentingan yang tajam.

Dalam banyak kasus, konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih klaim, perubahan penggunaan lahan, serta perebutan legitimasi identitas. Di Indonesia, kontestasi antara penambang besar dan penambang rakyat menunjukkan bagaimana identitas “community miner” digunakan sebagai dasar klaim moral atas tanah dan sumber daya (Libassi, 2024). Hal ini relevan dengan wilayah Malili yang sebelumnya juga memiliki sejarah penambangan nikel dan pertanian, sehingga transformasi menuju kawasan industri IHIP berpotensi memicu negosiasi ulang identitas masyarakat sebagai pemilik lahan dan pelaku ekonomi lokal.

Secara sosiologis, masyarakat lokal di lingkaran industri pertambangan ini mengalami apa yang disebut (Bourdieu, 2020) sebagai ancaman terhadap “modal simbolis” dan “modal ekonomi”. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian tanaman produktif seperti merica (lada), cokelat, dan damar merupakan pondasi identitas sosial mereka. Ketika fungsi lahan beralih menjadi kawasan industri, masyarakat tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan ikatan historis dengan tanah leluhur yang telah mereka tempati dalam jangka waktu lama.

Konflik dalam pembangunan kawasan industri besar sering kali mengikut pola serupa dengan pembangunan *overseas industrial parks* yang dibiayai modal asing. Studi mengenai industrial parks di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kelemahan institusi lokal, praktik pengadaan lahan yang tidak partisipatif, dan dominasi aktor negara sering menghasilkan konflik antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal (Li & Hu, 2025). Dinamika ini

sejalan dengan konteks PSN IHIP yang dikembangkan melalui kemitraan strategis pemerintah–swasta sehingga menuntut tata kelola yang inklusif.

Proses transisi ini memicu dinamika “negosiasi identitas”, di mana masyarakat lokal mencoba mempertahankan posisi tawar mereka melalui narasi kearifan lokal dan tradisi turun-temurun. Dalam konteks ini, identitas etnis dan kolektivitas seringkali dijadikan alat politik untuk menuntut keadilan, terutama dalam mekanisme ganti tumbuh. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah kompensasi yang diberikan sudah mencakup aspek keadilan jangka panjang, termasuk penggantian akses terhadap air dan hutan yang hilang akibat aktivitas pertambangan.

Negosiasi identitas menjadi aspek penting karena masyarakat tidak hanya mempertahankan ruang hidup, tetapi juga mempertahankan makna sosial dan budaya yang melekat pada tanah tersebut. Studi di Belitung menunjukkan bahwa identitas sosial masyarakat dibentuk oleh kedekatan ekonomi, pengalaman ekologis, dan relasi kuasa dalam industri ekstraktif (Erkan et al., 2025). Pada proyek IHIP, perubahan ekologi dan ekonomi berpotensi memengaruhi identitas masyarakat Malili, termasuk relasi mereka pada tanah adat, mata pencaharian, dan jaringan sosial.

Ketegangan antara masyarakat dan perusahaan menciptakan kebutuhan mendesak akan strategi mediasi yang efektif. Neraca konflik di wilayah ini menunjukkan adanya riwayat persinggungan antara masyarakat dengan pihak perusahaan atau lembaga lain yang memerlukan penanganan sistematis. Arifin, (2005) mencatat bahwa keberhasilan industrialisasi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memitigasi dampak sosial-ekonomi di tingkat tapak agar tidak berujung pada eksklusi sosial.

Konflik lahan juga memperlihatkan bagaimana aktor berpengaruh—tokoh adat, kepala desa, elite politik, maupun broker lahan—memainkan peran sentral dalam menentukan arah konflik. Penelitian di Ghana menunjukkan bahwa aktor yang memiliki sumber daya ekonomi, dukungan negara, atau akses jaringan kekuasaan cenderung memenangkan sengketa lahan di wilayah pertambangan dan industri (Denchie et al., 2021). Pola serupa ditemukan pada sejumlah PSN di Indonesia, termasuk IHIP, di mana legitimasi tokoh lokal berperan besar dalam memobilisasi dukungan atau resistensi.

Di sinilah peran tokoh berpengaruh (stakeholders) menjadi sangat krusial sebagai jembatan komunikasi. Dalam struktur masyarakat Luwu Timur, terdapat tokoh-tokoh dominan yang memiliki spektrum pengaruh besar, baik yang cenderung mendukung maupun menentang program pemerintah. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai mediator yang dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahan dan merumuskan solusi ideal yang diharapkan oleh komunitas terdampak.

Mediasi menjadi salah satu strategi yang diakui mampu mengelola konflik lahan apabila dilakukan secara independen, partisipatif, dan menghargai posisi semua pihak. Studi tentang mediasi dalam konflik pertambangan rakyat menegaskan bahwa pendekatan ini efektif karena mempertimbangkan aspek budaya lokal, biaya rendah, serta fokus pada pemulihan relasi (Purwanti et al., 2023). Relevansi mediasi menjadi semakin penting bagi IHIP yang melibatkan ragam kepentingan antara pemerintah, investor Tiongkok, dan komunitas lokal.

Namun efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh ketimpangan kuasa. Analisis mediasi sengketa lahan menunjukkan bahwa proses ini sering kali gagal jika tidak ada mekanisme yang

mengurangi dominasi aktor kuat atau memastikan representasi kelompok rentan (Derevyanko et al., 2023). Dalam konteks PSN IHIP, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada transparansi data lahan, keterlibatan masyarakat adat, dan kehadiran tokoh lokal sebagai pen jembatan kepentingan.

Dengan demikian, konflik lahan di sekitar IHIP harus dipahami sebagai proses negosiasi identitas, perebutan ruang, dan kontestasi kepentingan antar aktor. Pembelajaran dari berbagai studi pertambangan menunjukkan bahwa strategi mediasi yang efektif harus mengintegrasikan pemahaman subjektivitas masyarakat, struktur kekuasaan, serta peran tokoh berpengaruh dalam menjaga legitimasi proses (Devi et al., 2025). Pendekatan demikian penting agar transformasi kawasan industri di Malili dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Sebagai simpulan, penelitian ini berfokus pada analisis dinamika konflik lahan serta proses negosiasi identitas masyarakat lokal dalam menghadapi ekspansi industri pertambangan, serta mengkaji strategi mediasi yang dilakukan oleh aktor/masyarakat lokal. Dengan memetakan jaringan sosial dan peran tokoh-tokoh kunci, diharapkan ditemukan model mediasi yang mampu menjamin keadilan bagi masyarakat lokal sekaligus memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis (constructivist approach). Pendekatan ini memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, pengalaman, dan interpretasi aktor sosial. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam perspektif konstruktivis, realitas dipahami sebagai sesuatu yang bersifat plural, kontekstual, dan dibangun melalui proses sosial (John W. Creswell, 2015)

Pendekatan konstruktivis juga menekankan bahwa pengetahuan dibentuk melalui pengalaman sosial dan interaksi manusia dalam konteks tertentu (Schwandt, 1994). Dalam konteks penelitian ini, konflik lahan dan negosiasi identitas tidak dilihat sebagai fenomena yang tunggal, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasi-Pasi dan Desa Harapan yang berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah terdampak langsung dari aktivitas industri pertambangan, sehingga memiliki dinamika konflik lahan dan interaksi sosial yang kompleks.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan terdiri dari Tokoh Masyarakat, Aparat desa, Petani/masyarakat terdampak, Tokoh adat atau agama, Perwakilan kelompok perempuan atau pemuda. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi (depth of information), bukan jumlah responden.

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi masyarakat dalam menghadapi konflik lahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar konflik, memahami relasi kekuasaan serta menggali proses negosiasi identitas dalam Masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sebagaimana disarankan oleh (Denzin, 2017). Penelitian lapangan dilaksanakan selama empat bulan dari Agustus-November 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Pembentukan Komunitas dan Konstruksi Identitas Etnis-Budaya

Penelitian di Desa Harapan dan Desa Pasipasi menunjukkan bahwa pembentukan komunitas lokal di wilayah lingkaran industri Malili khususnya di Desa Harapan dan Desa Pasipasi, merupakan hasil dari proses asimilasi yang panjang antara penduduk asli dan gelombang pendatang. Identitas masyarakat di sini tidak bersifat statis, melainkan terus bernegosiasi dengan sejarah perpindahan pemukiman dan program negara.

3.1.1. Desa Harapan: Identitas Eksodus dan Sejarah Perpindahan

Desa Harapan mencerminkan identitas yang dibentuk oleh program transmigrasi dan sejarah perpindahan akibat ekspansi industri masa lalu. Dusun Makarti, misalnya, terbentuk dari eksodus pengungsi konflik Timor-Timur, Poso, dan Ambon pada tahun 1999. Menariknya, para pendatang ini tidak lagi merasa sebagai "orang luar", melainkan telah terasimilasi penuh dalam struktur sosial dan pemerintahan desa.

YR, Kepala Dusun Makarti yang merupakan keturunan Timor-Timur, menjelaskan:

"Sekarang bertambah masyarakat transmigrasi sudah puluhan tahun jadi anaknya yang lahir di sini sudah menikah... sudah jadi Desa Harapan. Kami awalnya 73 Kepala Keluarga dari Timor-Timur yang dipindahkan resmi oleh pemerintah". – Informan YR (Kepala Dusun/Tokoh Komunitas)

Secara historis, komunitas di sini juga memiliki memori kolektif tentang pengungsian akibat industri. Warga pernah dipindahkan beberapa kali demi kepentingan eksplorasi tambang PT. Vale (dahulu PT. Inco), dari kawasan Waru-warung ke Salabongkok, hingga ke lokasi saat ini. Hal ini menciptakan identitas masyarakat yang adaptif namun waspada terhadap perubahan ruang hidup.

3.1.2. Desa Pasipasi: Pluralisme yang Harmonis

Berbeda dengan Harapan, Desa Pasipasi (pemekaran dari Desa Harapan tahun 2010) didominasi oleh etnis Bugis, Belawa, Luwu, Bajo, dan Toraja. Konstruksi identitas di Pasipasi lebih bersifat fungsional-ekonomi sebagai masyarakat agrowisata dan perkebunan.

SIH (Plt. Kepala Desa) mencatat:

"Untuk Desa Pasipasi hampir tidak memiliki penduduk asli... Suku Belawa hampir yang mendominasi. Meskipun bercampur suku, tingkat kerukunan antarwarga tetap terjaga dengan baik".-SIH (Plt Kepala Desa)

3.2. Kearifan Lokal dalam Memaknai Kepemilikan dan Pengelolaan Lahan

Kearifan lokal di wilayah penelitian mengalami pergeseran dari ritual simbolis menuju praktik perlindungan lingkungan yang pragmatis-fungsional. Makna tanah tidak lagi hanya dipandang sebagai warisan leluhur yang dikeramatkan, tetapi sebagai fondasi kedaulatan ekonomi di tengah kepujungan industri.

3.2.1. Pudarnya Ritual, Munculnya Konservasi Fungsional

Ritual adat seperti *Maccera Tasi* (ritual laut) di Desa Harapan kini telah punah, terakhir dilaksanakan sekitar 15 tahun lalu. Namun, nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dalam bentuk kepatuhan terhadap alat tangkap tradisional. Nelayan di Lampia menolak penggunaan pukat modern bukan sekadar karena ekonomi, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap kelestarian laut.

JM (BPD Desa Harapan) menjelaskan:

"Alhamdulillah di Dusun Lampia itu semua alat tangkap nelayan masih masuk kategori tradisional... mereka melihat kampung-kampung lain sangat berbahaya (merusak) dan sering bermasalah hukum".-JM (BPD Desa Harapan)

3.2.2. Tanah sebagai Ruang Janji dan Kekecewaan

Masyarakat memaknai lahan sebagai "modal simbolis" yang sering kali dikontestasikan dengan janji perusahaan. Kasus lahan kompensasi PLTA Karebbe seluas 395 hektar menjadi bukti bagaimana masyarakat memaknai hak atas tanah melalui janji historis pembangunan "Bogor Kedua" yang tidak pernah terealisasi.

DS (Ketua RT di Desa Harapan) mengungkapkan kekecewaannya:

"Jadi kemarin itu, PT. Vale itu berjanji sama kami... mau dijadikan Bogor kedua, ada pacuan kuda, ada pemandiannya, mau dijadikan desa wisata. Padahal daerah tersebut adalah hutan lindung".- DS (Ketua RT di Desa Harapan)

Di Pasipasi, lahan dimaknai sebagai ruang produksi sayur organik yang dikelola secara kolektif oleh perempuan (KWT) sebagai strategi diversifikasi pendapatan agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor tambang.

3.3. Dinamika Konflik Lahan dan Negosiasi Identitas di Lingkar Tambang

Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) PT. IHIP dan operasional PT. CLM memicu proses "negosiasi identitas" dimana masyarakat harus memilih untuk tetap menjadi petani/nelayan atau bertransformasi menjadi buruh industri.

3.3.1. Negosiasi Peran: Nelayan Menjadi "Pilot Boat"

Konflik muncul ketika jalur kapal perusahaan tambang mengganggu area tangkap nelayan. Strategi negosiasi yang muncul adalah perubahan identitas fungsional: nelayan kini berperan sebagai pemandu kapal (*pilot boat*). Ini adalah bentuk kompromi ruang laut yang hilang.

3.3.2. Strategi Mediasi Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal menggunakan lembaga formal desa dan tokoh berpengaruh sebagai mediator utama. Di Desa Pasipasi, musyawarah sering dilakukan di masjid pada malam hari

untuk memastikan partisipasi warga. Sebaliknya, di Desa Harapan, terjadi ketegangan partisipasi di mana tokoh masyarakat bersikap tegas terhadap keterwakilan kelompok.

JM menceritakan strategi mediasinya yang unik:

"Saya bahkan pernah menghentikan jalannya musyawarah karena tidak ada keterwakilan dari kelompok nelayan. Musyawarah tidak akan efektif jika tidak dihadiri seluruh elemen".-JM

3.3.3. Tantangan Ketimpangan Kuota Tenaga Kerja

Isu utama yang memicu kerawanan sosial adalah persepsi ketidakadilan dalam distribusi tenaga kerja. Masyarakat melakukan negosiasi dengan menuntut transparansi rekrutmen melalui sistem rekomendasi pemerintah desa untuk memprioritaskan warga "lokal".

YS (Mantan Kades Pasipasi) memperingatkan:

"Yang penting perusahaan masuk mau bekerjasama memperhatikan masyarakat di sini... Karena kapan tidak dipenuhi keinginan masyarakat, sedangkan orang lain dari luar diterima, itu yang bisa menyebabkan konflik".- YS (Mantan Kades Pasipasi)

3.4. Pembahasan: Perspektif Bourdieu dan Negosiasi Ruang

Secara sosiologis, apa yang terjadi di Desa Harapan dan Pasipasi adalah perjuangan mempertahankan Modal Ekonomi (lahan kebun dan laut) dan Modal Simbolis (status sebagai penduduk asli/lokal). Ketika perusahaan tambang hadir, terjadi "kekerasan simbolis" di mana narasi pembangunan nasional (PSN) sering kali memaksa masyarakat menerima ganti rugi yang tidak sebanding dengan hilangnya habitus mereka sebagai masyarakat agraris dan pesisir.

Negosiasi identitas muncul dalam bentuk pembentukan kelompok-kelompok baru seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) atau organisasi pemuda (Karang Taruna) yang menjadi alat tawar kolektif. Strategi mediasi yang dilakukan aktor lokal, mulai dari blokade jalan hingga musyawarah tripartite menunjukkan bahwa masyarakat Malili bukanlah objek pasif, melainkan subjek yang secara aktif menegosiasikan eksistensi mereka di tengah transformasi industri nikel yang masif.

4. KESIMPULAN

Konflik di Malili bukan sekadar soal fisik tanah, melainkan soal bagaimana komunitas yang heterogen (transmigran dan lokal) menyatukan identitas mereka untuk menghadapi tekanan ekstraktif. Mediasi yang efektif memerlukan pengakuan terhadap sejarah perpindahan warga dan integrasi nilai kearifan lokal yang kini telah bertransformasi menjadi kesadaran ekologis kolektif.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika sosiopolitik di Malili, peneliti menginterpretasikan bahwa akar masalah besar dalam konflik ini terletak pada benturan paradigma antara "ruang hidup" (living space) masyarakat agraris-nelayan dengan "ruang produksi" industri skala besar yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) PT IHIP. Masalah ini diperparah oleh apa yang disebut sebagai "kekerasan simbolis", di mana negara dan korporasi memaksakan narasi pembangunan nasional yang seringkali menafikan modal simbolis dan ikatan historis masyarakat adat Padoe serta warga transmigran terhadap

tanah mereka. Kondisi isu terkini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang akut, tercermin dari polemik lahan kompensasi PLTA Karebbe seluas 395 hektar yang memicu tuntutan warga sebesar Rp 1,38 triliun kepada Pemkab Luwu Timur pada awal 2026.

Di sisi lain, degradasi ekologis di Desa Pasi-Pasi telah menghancurkan livelihood nelayan tradisional akibat pendangkalan dermaga dan pencemaran limbah, memaksa mereka melaut hingga ke wilayah Sulawesi Tenggara dengan biaya operasional yang meningkat drastis. Fenomena "perusahaan untung, masyarakat buntung" ini menciptakan distrust (ketidakpercayaan) yang mendalam karena masyarakat merasa hanya menjadi penonton di tengah investasi yang mencapai Rp 22,1 triliun.

Sebagai solusi atas kompleksitas tersebut, peneliti merekomendasikan transisi dari mediasi birokrasi yang reaktif menuju model mediasi inklusif yang mengintegrasikan hukum adat dan memposisikan tokoh masyarakat sebagai mediator independen guna menyeimbangkan ketimpangan kuasa. Pemerintah daerah dan pusat harus segera melakukan audit transparansi aset dan sinkronisasi data lahan dengan BPN untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim secara jujur. Rekomendasi kebijakan pemerintah meliputi pengetatan pengawasan terhadap dokumen AMDAL dan RKKPN agar tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan lingkungan yang substantif. Selain itu, pemerintah perlu mewajibkan perusahaan menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan melalui skema rekomendasi desa untuk memprioritaskan 75% kuota bagi warga lokal guna meminimalkan potensi konflik horizontal. Hilirisasi nikel harus dievaluasi agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan kedaulatan pangan dan kelestarian ekosistem pesisir melalui program pemberdayaan yang berbasis pada habitus asli masyarakat Malili, seperti pertanian merica dan perkebunan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2005). *Ekonomi kelembagaan pangan*. LP3ES.
- Bourdieu, P. (2020). Outline of a Theory of Practice. In *The new social theory reader* (pp. 80–86). Routledge.
- Denchie, E. O., Ablo, A. D., & Overå, R. (2021). Land governance and access dynamics in Sekondi-Takoradi, Ghana. *African Geographical Review*, 40(4), 364–377. <https://doi.org/10.1080/19376812.2020.1831560>
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Derevyanko, B., Lohvynenko, M., Nezhevelo, V., Nikolenko, L., & Zahrisheva, N. (2023). Legal Foundations for Resolving Land Disputes Through Mediation as An Alternative Dispute Resolution Method. *European Energy and Environmental Law Review*, 248–256. <http://www.kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\EELR\EELR2023014.pdf>
- Devi, B., Mayes, R., & Grant-Smith, D. (2025). ‘Who intersects with whom’: Competing rationalities in governing the contested interface between industrial mining and ASGM in Gorontalo Province, Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101691>

- Erkan, D., Warsilah, H., & Cahyarini, S. Y. (2025). Community responses in a contested mining landscape: Perceptions and power in Belitung, Indonesia. *Resources Policy*, 111, 105785. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105785>
- John W. Creswell. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi keti). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Li, D., & Hu, Q. (2025). Land transaction trajectories of China's overseas industrial parks in developing countries: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Geographical Sciences*, 35(6), 1286–1310.
- Libassi, M. (2024). Gold conflict and contested conduct: Large- and small-scale mining subjectivities in Indonesia. *Geoforum*, 148. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.10.005>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.
- Purwanti, A., Setiawan, F. A., & Natalis, A. (2023). Mediation as Dispute Resolution in People's Mining. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012010>
- Schwandt, T. A. (1994). *Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry*.